

RANCANGAN

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025-2029



KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025
Jl. A. Yani No.003 Bengkalis

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat Nya sehingga perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis ini telah dapat diselesaikan secara baik berdasarkan hasil evaluasi hingga tahun sebelumnya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bengkalis ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Bengkalis yakni dari tahun 2025 – 2029.

Secara umum Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 memuat keseluruhan kebijakan publik secara khusus membahas kebijakan publik sektor penanggulangan bencana yang terkait dengan APBD yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Secara rinci Renstra Badan penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 berisi informasi kemajuan yang telah dicapai, masalah serta tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada masing-masing bidang urusan dilingkungan badan penanggulangan bencana daerah. Dari telaah tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang ingin dicapai serta prioritas pembangunan yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan dalam kurun waktu 2025-2029. Dengan arah kebijakan pada masing masing bidang, yang meliputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kadaruratan, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, selanjutnya disusun program program pembangunan, dan berbagai kegiatan dengan indikatif pendanaan.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 juga dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh unit di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dibiayai oleh APBD Tahun 2025-2029 yang secara substansi sejalan dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan Masyarakat Bangsa dan Negara. Amin Ya Rabbal Alamin.
Wasalamu alaikum Wr.Wb.

Bengkalis,

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BENGKALIS



Drs. SUFANDI, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19960723 199710 1 001

DAFTAR ISI

COVER

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2. Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	11
2.2.1. Sumber Daya Manusia	11
2.2.2. Sarana dan Prasarana	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan	18
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .	28
2.4.1. Analisis Lingkungan Internal.....	29
2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal.....	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	31
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	31
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	35
3.3. Telaah RENSTRA BNPB dan RENSTRA BPBD Prov. Riau.....	39
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	40
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	44
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	55
6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	55
6.2. Kelompok Sasaran.....	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	70
BAB VIII PENUTUP.....	72
8.1. Kesimpulan.....	72
8.2. Kaidah Pelaksanaan.....	72
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Menurut Kelompok Umur.....	11
Tabel 2.2	Komposisi ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan Jabatan.....	12
Tabel 2.3	Komposisi ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan.....	13
Tabel 2.4	Komposisi ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan.....	14
Tabel 2.5	Daftar asset yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.....	15
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2025.....	20
Tabel 2.7	Target dan Realisasi Belanja Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis 2021-2024.....	23
Tabel 2.8	Belanja Operasi (Moda, Barang dan Jasa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024.....	24
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024.....	25
Tabel 3.1	Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Dalam Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.....	33
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan-Permasalahan Penentuan Program Prioritas Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkalis...	34
Tabel 3.3	Keterkaitan antara pokok-pokok Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.....	37
Tabel 3.4	Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan tugas Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.....	38
Tabel 3.5	Identifikasi Isu Strategis KLHS.....	42
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.....	47
Tabel 4.2	Formulasi Perhitungan Masing-masing Indikator Terhadap Sasaran.....	48
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.....	51
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.....	52
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.....	60
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Rencana Strategis.....	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.....	10
Gambar 4.1	Analisa Pohon Masalah.....	44
Gambar 4.2	Analisa Pohon Tujuan.....	45
Gambar 4.3	Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator).....	45
Gambar 5.1	Matrik Analisa SWOT.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang urusan penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen terus-menerus melakukan perubahan paradigma pelayanan informasi bencana kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dan penyelamatan dan evakuasi bencana yang lebih baik merupakan tuntutan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemerintahan. Hal ini penting karena merupakan salah satu komponen dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bengkalis.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD)

Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, yang menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan Pemerintah di tingkat pusat dan Daerah.

Dalam penyusunan Renstra merupakan amanat Undang-undang dalam penyusunan ini adalah hal yang sangat penting sehingga Renstra ini disusun untuk:

1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan
3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Bengkalis.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai landasan hukum dalam penyusunannya adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421. dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten BEngkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.

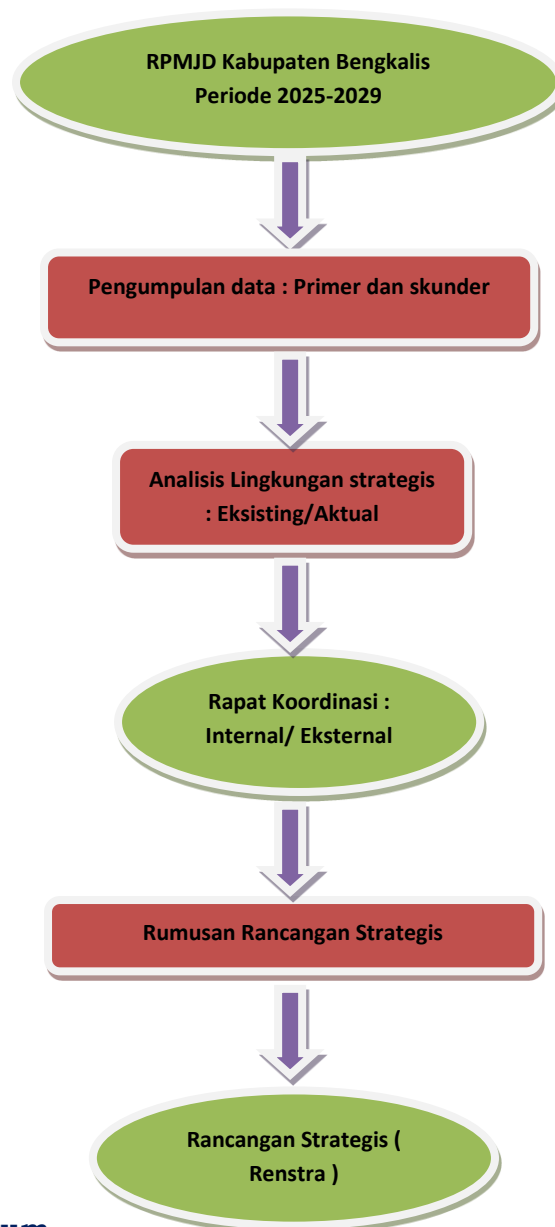
1. Tugas dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis memiliki tugas pokok dan Fungsi yaitu Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Kepala Daerah sehari-hari dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana tanggap, darurat bencana dan pasca bencana diantaranya:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang penangulangan bencana;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah dibidang penangulangan bencana;

- Pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekontruksi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Rencana Strategis



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045;

19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun Nomor);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengklis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Janga Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis;
23. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Perarturan Bupati Bengkalis Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 disusun adalah sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 tahun 2024 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis serta Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan

organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja dan sebagai dokumen perencanaan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Menelaah kinerja pembangunan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimasa mendatang;
4. Pedoman dalam penyusunan Renja pada setiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang tujuan, sasaran, strategi dan Arah Kebijakan yang hendak dicapai, dalam mencapai pelayanan perangkat daerah.

**BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Pengaturan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

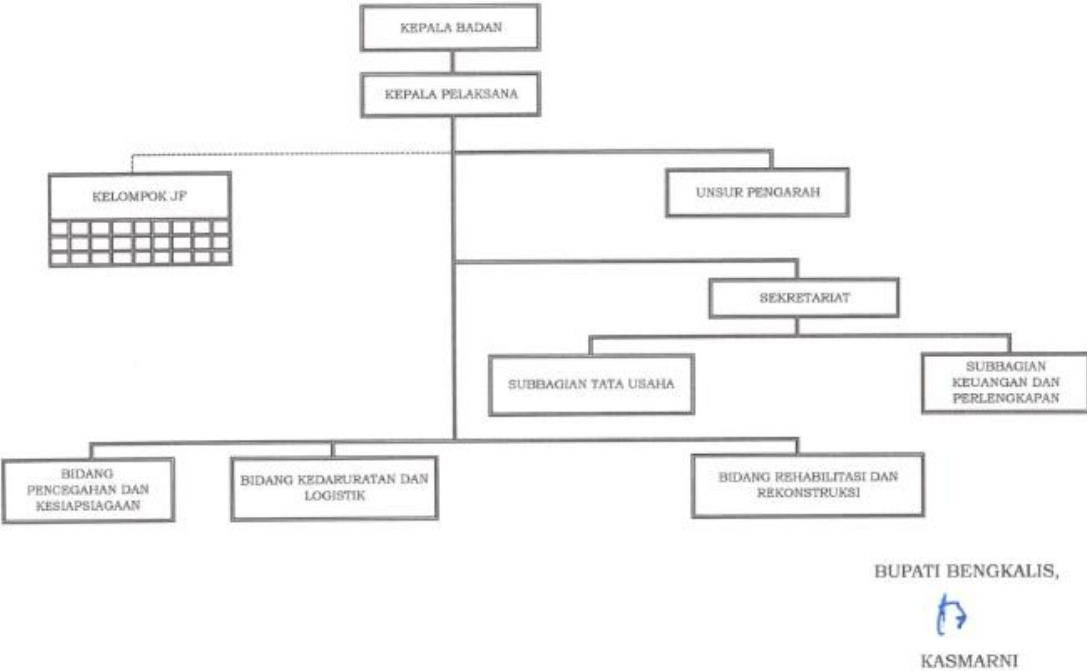
Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan Penyusunan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat dan rehabilitasi serta Rekonstruksi;
3. Menetapkan standarisasi, kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana dan rehabilitasi serta Rekonstruksi;
4. Menyusun dan menetapkan serta menginformasikan peta rawan bencana;
5. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap (protap) penanganan bencana;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkalis membentuk struktur organisasi berdasarkan lampiran Peraturan Bupati Bengkalis Nomor: 57 tahun 2024 sebagai berikut :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

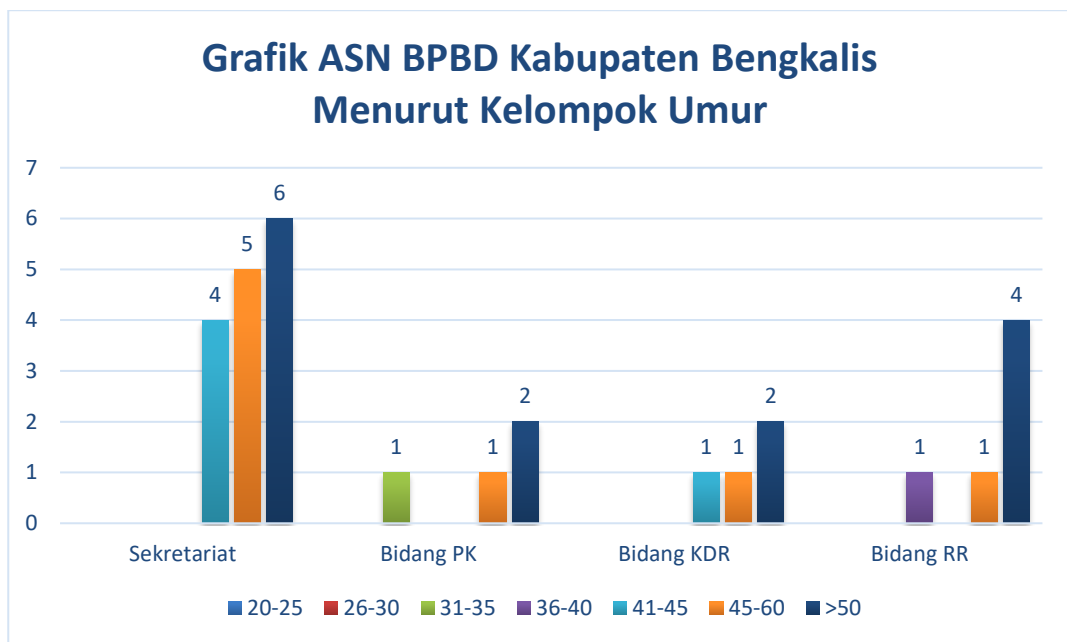
2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Desember 2024, jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis adalah 28 orang PNS, dan Tenaga Kontrak sebanyak 204 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi ASN BPBD Kabupaten Bengkalis Menurut Kelompok Umur

NO.	UNIT KERJA	USIA TAHUN							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	45-50	>50	
1.	Sekretariat	-	-	-	-	4	6	4	14
2.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-	1	-	-	1	2	4
3.	Bidang Kedaruratan	-	-	-	-	1	1	2	3
4.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	-	-	1	-	1	4	6
Total		-	-	1	1	5	9	12	28

Sumber Data : Sub. Bagian Tata Usaha Bpbd Kab. Bengkalis Tahun 2024.

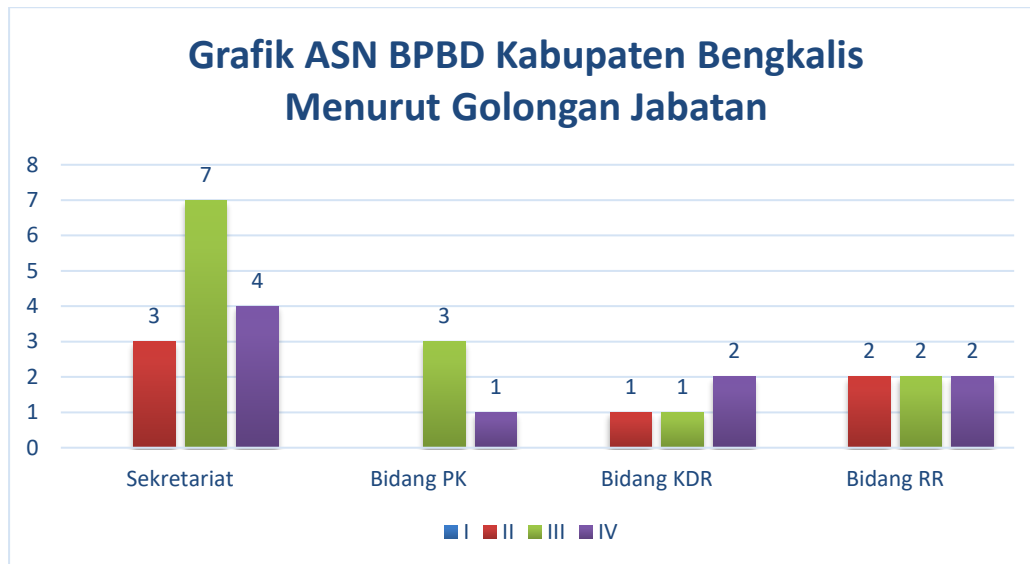


Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas dapat dilihat bahwa PNS di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Masih di dominasi oleh usia muda dan produktif yakni usia 20-50 tahun sebanyak 16 orang sedangkan selebihnya 12 orang adalah usia >50 tahun.

Tabel 2.2
Komposisi ASN BPBD Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan Jabatan

NO.	UNIT KERJA	GOLONGAN				JENIS KELAMIN	
		I	II	III	IV	L	P
1.	Sekretariat	-	3	7	4	11	3
2.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-	3	1	3	1
3.	Bidang Kedaruratan	-	1	1	2	4	
4.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi		2	2	2	6	
Total		-	6	13	9	24	4

Sumber data : Sub. Bagian Tata Usaha BPBD Kab. Bengkalis Tahun 2024.

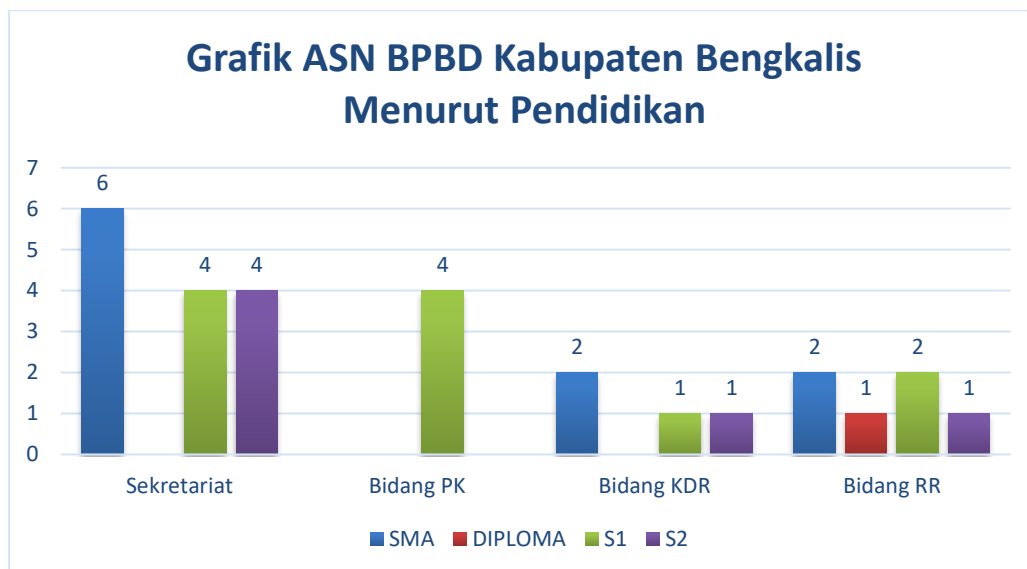


Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan peta jabatan ASN di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis masih didominasi oleh golongan III sebanyak 13 orang, Golongan II sebanyak 6 orang dan Golongan IV sebanyak 9 orang.

Tabel 2.3
Komposisi ASN BPBD Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan

NO.	UNIT KERJA	PENDIDIKAN				JUMLAH
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1.	Sekretariat	6	-	4	4	14
2.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-	4	-	4
3.	Bidang Kedaruratan	2	-	1	1	4
4.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2	1	2	1	6
Jumlah		10	1	11	6	28

Sumber data : Sub. Bagian Tata Usaha BPBD Kab. Bengkalis Tahun 2024.

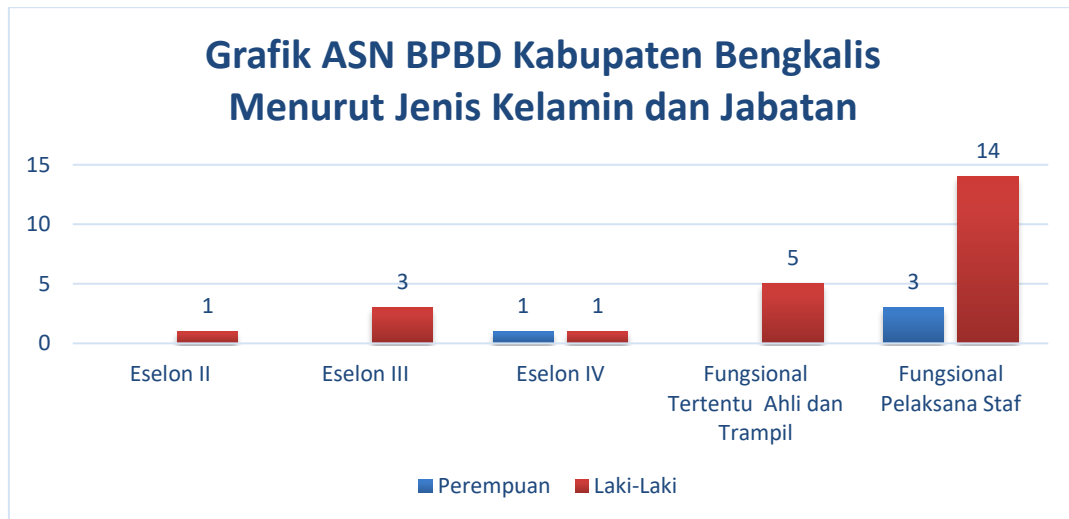


Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan pendidikan ASN di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis untuk tingkat SMA sebanyak 10 orang, Diploma sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 11 orang dan S2 sebanyak 6 orang.

Tabel 2.4
Komposisi ASN BPBD Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

NO.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		P	L	
1.	Eselon II	-	1	1
2.	Eselon III	-	3	3
3.	Eselon IV	1	1	2
4.	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	-	5	5
5.	Pelaksana (Staf)	3	14	17
Jumlah		4	24	28

Sumber data : Sub. Bagian Tata Usaha BPBD Kab. Bengkalis Tahun 2024.



Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan jenis kelamin ASN di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis didominasi oleh Laki-laki sebanyak 24 orang dan untuk perempuan sebanyak 4vorang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.5
Daftar asset yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bengkalis

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Status	Kondisi
1	2	3	4	5	6
A. Gedung					
1.	Gedung Kantor	1	Unit	Hak Pakai	Baik
2.	Posko	5	Unit	Milik	Baik
B. Kendaraan Roda Empat					
1.	Kendaraan Dinas/Operasional	2	Unit	Hak Pakai	Baik
2.	Kendaraan Rescue	3	Unit	Milik	Baik
C. Kendaraan Roda Dua					
1.	Kendaraan Trail	5	Unit	Milik	Baik
2.	Kendaraan Dinas/Operasional	1	Unit	Milik	Baik
D. Perahu					
1.	Perahu Karet+Mesin+Peralatan	3	Unit	Milik	Baik

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Status	Kondisi
1	2	3	4	5	6
2.	Speed Boat Amphibi	1	Unit	Milik	Baik
3.	Boat Rescue	1	Unit	Milik	Baik
E. Peralatan Komunikasi					
1.	Handy Talky	17	Unit	Milik	Baik
2.	Pesawat Radio Riq	3	Unit	Milik	Baik
3.	Hand Mic (Pengeras Suara)	3	Unit	Milik	Baik
4.	Repeater	-	Unit	Milik	Baik
F. Peralatan Penunjang					
1.	Komputer	24	Unit	Hak Pakai	Baik
2.	Meja Komputer	10	Unit	Hak Pakai	Baik
3.	Printer	19	Unit	Hak Pakai	Baik
4.	Laptop	14	Unit	Hak Pakai	Baik
5.	AC Ruangan	30	Unit	Hak Pakai	Baik
6.	Meja kerja	42	Unit	Hak Pakai	Baik
7.	Lemari Besi	4	Unit	Hak Pakai	Baik
8.	Lemari Arsip	22	Unit	Hak Pakai	Baik
9.	UPS	20	Unit	Hak Pakai	Baik
10.	GPS	-	-	-	-
11.	Mesin Ketik	4	Unit	Hak Pakai	Baik
12.	Kipas Angin	2	Unit	Hak Pakai	Baik
13.	Kursi Kerja	58	Unit	Hak Pakai	Baik
14.	Dispenser Air	-	Unit	Hak Pakai	Baik
15.	Hendy Tacki	17	Unit	Hak Pakai	Baik
16.	TV	7	Unit	Hak Pakai	Baik
17.	Filling Kabinet	23	Unit	Hak Pakai	Baik
18.	Overhead Projector/Infocus	1	Unit	Hak Pakai	Baik
19.	Mesin Photocopy	2	Unit	Hak Pakai	Baik
20.	Camera LCDR (Digital)	-	Unit	Hak Pakai	Baik
21.	Alat Penghancur Kertas	5	Unit	Hak Pakai	Baik
22.	Faximili	-	Unit	Hak Pakai	Baik
23.	Lemari Pendingin	2	Unit	Hak Pakai	Baik
24.	Mesin Pendingin Kipas	2	Unit	Hak Pakai	Baik
25.	Hardisk	-	-	-	-
26.	Note Book	-	-	-	-
27.	Berangkas	1	Unit	Hak Pakai	Baik
28.	Serial Pointer	-	Unit	-	-
29.	Mesin Potong Rumput	1	Unit	Hak Pakai	-
30.	Kompas	-	Unit	-	-
31.	Sound System	1	Unit	-	-
32.	CCTV	15	Unit	Hak Pakai	Baik
33.	Plotter	-	Unit	Hak Pakai	Baik
34.	Tenda Posko Pengungsi	8	Unit	Milik	Baik
35.	Tenda Pleton	1	Unit	Milik	Baik
36.	Tenda Regu	-	Unit	-	-
37.	Tenda Keluarga	4	Unit	Milik	Baik

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Status	Kondisi
1	2	3	4	5	6
38.	Velbed	-	Unit	-	-
39.	Server PUSDATIN	1	Set	Milik	Baik
40.	Senter LHD	-	Unit	Milik	Baik
41.	UPS	-	Unit	-	-
42.	Almari	-	Unit	-	-
43.	Mesin Ginset	1	Unit	Milik	Baik
44.	Papan Data	1	Unit	-	-
45.	White Board	1	Unit	Milik	Baik
46.	Kompas gas	1	Unit	Milik	Baik
47.	Peralatan Makan	-	Set	-	-
48.	Peralatan Masak	-	Set	-	-
49.	Handy Cam	-	Unit	-	-
50.	Tabung Gas	1	Unit	Milik	Baik
51.	Rompi Pelampung	6	Unit	Milik	Baik
52.	Tandu	1	Unit	Milik	Baik
53.	Baju Selam	-	Unit	-	-
54.	Tabung Selam	-	Unit	-	-
55.	Brifing Aparatus	1	Unit	Milik	Baik
56.	Mesin Pemadam	20	Unit	Milik	Baik
57.	Nuzle	47	Unit	Milik	Baik
58.	Y Connection	14	Unit	Milik	Baik
59.	Selang	60	Roll	Milik	Baik
	Total	540			

Sumber: Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.

Tabel 2.5 diatas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatannya yang ada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis maupun yang ada di Pos BPBD di Kecamatan, untuk Gedung Kantor 6 Unit, terdiri dari 1 gedung Utama dan Pos 5 Unit, Kendaraan Roda 4 sebanyak 5 Unit, Kendaraan Roda 2 sebanyak 6 Unit, Perahu 6 unit, Peralatan Komunikasi 23 Unit, Peralatan Penunjang sebanyak 494 unit. Dari tiga pengelompokan asset dapat dihitung keseluruhan jumlah total asset sebanyak 540 unit.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja

dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan dalam bidang Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan umum dengan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Sasaran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD.

Hal-hal strategis yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2021-2024) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Posko Siaga Bencana di Setiap Kecamatan (Kecamatan Rupert Utara, Kecamatan Rupert, Kecamatan Bathin Sholapan, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bendar Laksamana dan Kecamatan Talang Muandau).
2. Pelaksanaan Sosialisasi, Edukasi Kepada Masyarakat di Setiap Kecamatan Desa dan Kelurahan dengan terbentuknya Masyarakat Peduli Bencana (MPB).
3. Pembuatan Sarana Informasi yakni berupa Website BPBD sebagai upaya sarana mempermudah bagi masyarakat umum untuk melaporkan kejadian baik berupa layanan informasi juga sebagai sarana lapor kejadian bencana secara cepat.
4. Pelaksanaan Pelatihan Mitigasi Kebencanaan kepada korban bencana dan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana.
5. Melakukan kerja sama dengan instansi vertikal (BMKG) dalam hal prediksi prakiraan cuaca.

6. Melakukan kerjasama daerah perbatasan antara kabupaten bengkalis dan kota dumai dalam penanganan kebencanaan.

Terkait dengan keberhasilan pencapaian target-target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2024 disajikan pada tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 berikut ini:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke - %				
						1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)		(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Persentase Penyelenggaraan Mitigasi Kebencanaan	Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Lahan				n / a	95%	95%	95%		n / a	95%	95%	100%		n / a				
2	Persentase Response Cepat Kejadian Luas Biasa (KLB) Bencana	Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Hutan				n / a	100%	100%	100%		n / a	100%	100%	100%		n / a				
3	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sesuai Kebutuhan Korban Bencana					n / a	60%	70%	80%		n / a	100%	100%	100%		n / a				
4	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja				n / a	BB	BB	BB		n / a	B	B	B		n / a	B	B	BB	

Tabel 2.6 menjelaskan Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024. Sasaran strategis Pada Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis menetapkan sasaran strategis telah terjadi perubahan Isu Strategis Daerah yakni Perubahan Sasaran dan indikator dari Tahun 2024 disebabkan mengikuti Rencana Strategis Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, yakni pada Indikator, Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas. Dengan Meningkatkan Pengelolaan Lahan dengan Indikator, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dan turunannya Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran Secara Terpadu, dengan indikator Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Lahan dan Persentase Penanganan Bencana Kebakaran Lahan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan terhadap indikator:

1. Terlaksananya Sosialisasi kepada masyarakat desa/kelurahan tentang pemahaman terhadap siaga bencana pada 11 Kecamatan/Kota sebagai mitra kerja BPBD Kabupaten Bengkalis di daerah;
2. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana;
3. Adanya dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana baik secara material maupun personil;
4. Adanya komitmen dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dengan Instansi terkait dalam mendukung dan bekerjasama dalam upaya penanggulangan bencana;
5. Dukungan dan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
6. Adanya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.

Permasalahan/Hambatan yang mempengaruhi keberhasilan terhadap indikator:

1. Bencana Alam berupa kabut asap menjadi fenomena setiap tahun disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan dunia usaha terhadap kelestarian lingkungan dengan melakukan pembakaran untuk pemanfaatan hutan dan lahan.

2. Sistem peringatan dini bencana alam (*early warning system*) untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan dimasyarakat belum ada.
3. Keterbatasan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana.
4. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.

Solusi/Strategi pemecahan masalah adalah :

1. Menumbuhkembangkan pemahaman masyarakat terkait akibat, dan bahaya yang ditimbulkan akibat pembakaran hutan dan lahan dengan ditunjang oleh sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana.
2. Harus adanya Sistem peringatan dini bencana alam (*early warning system*) untuk membangun komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan di masyarakat belum ada dengan cara membangun system penyampaian informasi kepada masyarakat secara luas seperti sosialisasi, video tron, pamflet, sependuk, baleho dan media cetak dan elektronik .
3. Harus adanya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif hal ini dapat dilakukan dengan penyusunan kajian resiko bencana, dan melakukan pelatihan, bimbingan teknis dan pengiriman petugas ASN, Recue, dan pusdatin untuk meningkatkan SDM ke BNPB.

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

a. Belanja Operasi Pegawai

Realisasi Anggaran Belanja Operasi (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2021-2024 adalah sejumlah Rp.19.260.919.607,00 (Sembilan belas milyar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh rupiah) atau

sebesar 92,98% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp.20.716.164.934,00 (Dua puluh milyar tujuh ratus enam belas juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Target dan Realisasi Belanja Pegawai
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bengkalis Tahun 2021-2024

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2021	5.023.961.970,00	4.426.980.296,00	88,12
2	2022	5.011.461.375,00	4.859.217.432,00	96,96
3	2023	5.045.451.129,00	5.033.412.841,00	99,76
4	2024	5.635.290.460,00	4.941.309.038,00	87,69
Jumlah		20.716.164.934,00	19.260.919.607,00	92,98

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja pegawai sudah cukup optimal dengan predikat “tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp.1.455.245.327,00 (Satu milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).

b. Belanja Operasi (Belanja Modal, Barang dan Jasa)

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021-2024 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp. 49.927.265.871,00 (Empat puluh sembilan milyar tujuh Sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp. 46.915.117.779,00, (empat puluh enam milyar Sembilan ratus lima belas juta serratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) atau sebesar 93,97%. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Belanja Operasi Belanja Modal, Barang dan Jasa Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Bengkalis Tahun 2021-2024

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2021	10.870.672.346,00	10.507.442.076,00	96,66
2	2022	14.838.080.794,00	14.096.387.189,00	95,00
3	2023	14.399.377.152,00	13.813.166.882,00	95,93
4	2024	9.819.135.579,00	8.498.121.632,00	86,55
Jumlah		49.927.265.871,00	46.915.117.779,00	93,97

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis bisa dikatakan belum maksimal dengan predikat “Cukup”. Dalam hal ini perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp.3.012.148.092,00 (tiga miliar dua belas juta serratus empat puluh delapan ribu Sembilan puluh dua rupiah).

Berdasarkan data yang diuraikan di atas, dapat dihitung bahwa rata-rata anggaran yang direalisasikan adalah sejumlah Rp. 46.915.117.779,00, (empat puluh enam miliar Sembilan ratus lima belas juta serratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) atau sejumlah Rp.49.927.265.871,00 (Empat puluh sembilan milyar tujuh Sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 s/d 2024.

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024

No	Uraian	Anggaran Tahun				Realisasi Anggaran Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata	
		Ke -				Ke -				Tahun Ke -				Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.924.127.358	11.273.196.408	11.525.687.605	11.856.861.698	7.868.186.683	11.272.697.342	9.220.464.078	7.145.885.053	72,03	100,00	80,00	60,27	1,24	1,18
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	600.000.000	675.000.000	814.183.000	700.000.000	189.740.600	898.222.214	719.622.528	40.246.979	31,62	100,00	88,39	5,75	1,23	1,02
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.528.392.638	5.023.961.970	5.023.961.970	5.333.961.970	4.426.980.296	4.859.217.432	5.033.412.841	5.068.708.938	97,76	96,72	100,00	95,03	1,25	1,24
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	192.000.000	192.000.000	307.000.000	307.000.000	192.000.000	334.519.200	233.281.200	199.712.400	100,00	100,00	75,99	65,05	1,30	1,18
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	800.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	88.886.209	429.363.975	110.243.200	-	11,11	107,34	27,56	-	1,18	1,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.210.000.000	1.186.805.878	1.186.805.878	1.225.000.000	1.156.262.046	1.410.790.519	1.284.830.761	825.276.699	95,56	100,00	100,00	67,37	1,24	1,15

No	Uraian	Anggaran Tahun Ke -				Realisasi Anggaran Tahun Ke -				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.190.126.720	2.000.000.000	1.986.908.197	1.627.910.000	70.076.000	711.991.350	177.700.000	-	3,20	35,60	8,94	-	1,19	1,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	478.608.000	746.878.560	746.878.560	746.878.560	239.515.487	508.228.264	523.614.483	503.662.821	50,04	68,05	70,11	67,44	1,26	1,27
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	925.000.000	1.048.550.000	1.059.950.000	1.516.111.168	1.504.726.045	2.120.364.388	1.137.759.065	508.277.216	100,00	100,00	100,00	33,53	1,33	1,08
II.	Program Penanggulangan Bencana	5.472.329.699	6.875.944.780	7.752.749.368	6.842.219.092	7.288.399.189	7.677.087.965	9.522.361.345	7.224.717.276	100,00	100,00	100,00	100,00	1,24	1,21
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	250.000.000	356.000.000	496.751.100	411.000.000	115.690.000	666.951.565	272.922.500	27.857.120	46,28	100,00	54,94	6,78	1,26	1,02
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	608.000.000	697.740.500	1.241.852.100	882.112.492	630.637.248	811.384.300	1.008.389.014	960.406.672	100,00	100,00	81,20	100,00	1,24	1,27

No	Uraian	Anggaran Tahun Ke -				Realisasi Anggaran Tahun Ke -				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3.900.000.000	4.232.000.000	4.140.000.000	4.055.000.000	5.081.352.300	4.659.905.400	7.322.896.500	6.059.279.346	100,00	100,00	100,00	100,00	1,23	1,24
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	714.329.699	1.590.204.280	1.874.146.168	1.494.106.600	1.460.719.641	1.538.846.700	918.153.331	177.174.138	100,00	96,77	48,99	11,86	1,25	1,03

Tabel di atas dapat dijelaskan beberapa catatan atas informasi kinerja anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2024 antara lain adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 mengalami rendahnya realisasi keuangan sebesar 60,27% dikarenakan tidak maksimalnya kegiatan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini berjalan sampai akhir tahun 2024 faktor keterbatasan Anggaran dan masalah teknis lainnya.
2. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 mengalami rendahnya realisasi kinerja sebesar 59,00% faktor keterbatasan Anggaran dan masalah teknis lainnya
3. Pada Program Penanggulangan Bencana Tahun 2024 mengalami rendahnya realisasi kinerja sebesar 41,27% dikarenakan tidak maksimalnya kegiatan program Penanggulangan Bencana ini berjalan sampai akhir tahun 2024 faktor keterbatasan Anggaran dan masalah teknis lainnya.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran pelayanan, *outcome* program, maupun *output* kegiatan serta berupaya memperbaiki kembali metode penyusunan perencanaan anggaran.

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi dimasa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi

permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan organisasi perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya bidang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai rincian tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kebijakan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

2.4.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis adalah **“Belum Maksimal Pengendalian Bencana”**. Permasalahan tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan beberapa bidang diantaranya :

1. Permasalahan 1 Belum Maksimal Belum Maksimal Pengendalian Bencana Banjir.
2. Permasalahan 2 Belum Maksimal Pengendalian Bencana Kebakaran.
Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah berikut :
 - a. Belum maksimal Pelaksanaan Sosialisasi, Informasi dan Edukasi Penanggulangan Bencana.
 - b. Masih terbatasnya Penyediaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana.
 - c. Belum Tersedianya Regulasi Daerah terkait dengan Penanggulangan Kebencanaan.
 - d. Lambatnya Informasi yang diterima dalam Penetapan Status Darurat Bencana.
 - e. Keterbatasan Sarana Prasarana dan Logistik (pangan, sandang, papan dll) Kebencanaan.
 - f. Belum Maksimal Koordinasi Petugas dilapangan antar Instansi terkait dalam Penanggulangan Bencana.

- g. Kurangnya kompetensi SDM yang memiliki keahlian dalam bidang perhitungan kajian kerusakan dan kerugian pasca bencana;
- h. Kurangnya Koordinasi antar Instansi dalam Penanganan Pasca Bencana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan dan akar masalah pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tabel dibawah ini:

**Tabel 2.10. Identifikasi Permasalahan-permasalahan Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkalis**

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum Maksimal Pengendalian Bencana	1. Belum Maksimal Pengendalian Bencana Banjir 2. Belum Maksimal Pengendalian Bencana Kebakaran	1. Belum maksimal Pelaksanaan Sosialisasi, Informasi dan Edukasi Penanggulangan Bencana. 2. Masih terbatasnya Penyediaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana. 3. Lambatnya Informasi yang diterima dalam Penetapan Status Darurat Bencana; 4. Keterbatasan Sarana Prasarana dan Logistik (pangan, sandang, papan dll) Kebencanaan; 5. Belum Maksimal Koordinasi Petugas dilapangan antar Instansi terkait dalam Penanggulangan Bencana. 6. Kurangnya kompetensi sdm yang memiliki keahlian dalam bidang perhitungan kajian kerusakan dan kerugian pasca bencana; 7. Belum adanya regulasi teknis penanganan pasca bencana; 8. Kurangnya koordinasi antar instansi dalam penanganan pasca bencana.

Dilihat dari table identifikasi permasalahan dan akar masalah dan pelayanan masih Belum Maksimal Pengendalian Bencana dikarenakan Belum Maksimal Pengendalian Bencana Banjir dan Belum Maksimal Pengendalian Bencana Kebakaran. Hal ini perlu peningkatan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Tabel 2.11. Identifikasi Permasalahan-permasalahan Penentuan Program Prioritas Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkalis

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penanggulangan Bencana			
1.1.	1. Jumlah Penduduk Dikawasan Rawan Bencana Yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Ancaman Bencana 2. Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3. Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Belum tercapai (<)	1. Belum Maksimal Pengendalian Bencana Banjir 2. Belum Maksimal Pengendalian Bencana Kebakaran	Meningkatnya Pengendalian Bencana

Berdasarkan tabel identifikasi permasalahan penentuan program prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang di uraikan pada table 3.2 dengan interpretasi Belum tercapai dikarenakan masih ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dan untuk menentukan keberhasilan program penanggulangan bencana perlunya Menyelenggarakan keterpaduan mitigasi kebencanaan dan penanganan kebencanaan yang responsif dan dinamis

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi Pengkoordinasian; Pengkomandoan, dan Pelaksana.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Pasal 12, 13 dan 14 dijelaskan Fungsi Koordinasi BPBD adalah Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan

pasca bencana. Fungsi Komando BPBD adalah pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah- langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Sedangkan Fungsi Pelaksana BPBD adalah melaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kinerja pelayanan PD kepada masyarakat. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

2.5. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dimasa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan Kepala Daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera Serta Unggul Di Indonesia” (BERMASA)

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bermarwah, memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan.
2. Maju, telah terpenuhi semua kebutuhan baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi, yang ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi Pemerintah yang professional dan berwibawa.
3. Sejahtera, telah terpenuhi kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil, merata dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminal serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian. Misi ini diarahkan untuk bisa memberdayakan semua potensi pendapatan daerah, termasuk aset daerah, BUMD; mengelola sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah; serta peningkatan upaya lainnya untuk memajukan perekonomian daerah dan masyarakat.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.
Misi ini diarahkan untuk menata birokrasi menuju good governance dan clean government; meningkatkan nilai-nilai agama dimasyarakat; penguatan nilai-nilai budaya melayu sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki karakter nilai yang kuat.

3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Misi ini diarahkan untuk menyediakan infrastruktur perhubungan, jalan, air, energi, dan lingkungan serta membangun wilayah perbatasan supaya masyarakatnya sejahtera.

Dari rumusan visi dan misi diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dapat diidentifikasi masuk pada misi ke 3 dan, bisa dilihat pada tabel 3.3 dibawah:

Tabel 2.12. Keterkaitan antara pokok-pokok Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA				
Misi 3 : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.				
3.1 Meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan serta mendorong pengembangan kawasan perbatasan yang tangguh dan berwawasan lingkungan.	3.1.4 Terjaganya kualitas lingkungan dan meningkatnya ketangguhan daerah dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Indeks Resiko Bencana	Meningkatkan koordinasi dan memperkuat sistem pencegahan dan mitigasi bencana daerah	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan penguatan sistem pencegahan dan mitigasi bencana daerah

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan daerah dalam mencapai dan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendukung Visi Misi dengan Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang sejalan yakni:

Tujuan : Meningkatnya Pengendalian Bencana.

Sasaran :

- (1) Meningkatnya Pengendalian Bencana Banjir.
- (2) Meningkatnya Pengendalian Bencana Kebakaran.

Strategi :

- (1) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana.
- (2) Peningkatan sarana dan prasarana.

- (3) Peningkatan kualitas pengelolaan sistem informasi kebencanaan.
- (4) Peningkatan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi bencana.
- (5) Peningkatan logistik bencana.
- (6) Peningkatan koordinasi antar instansi dalam penanggulangan bencana.

Arah Kebijakan :

- (1) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana.
- (2) Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
- (3) Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem informasi kebencanaan.
- (4) Meningkatnya kegiatan penyelamatan dan evakuasi bencana.
- (5) Tersedianya logistik bencana sesuai kebutuhan.
- (6) Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam penanggulangan bencana.

Tabel 2.13. Visi, Misi Tujuan, sasaran dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan tugas Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Target						Kon disi Akhi r
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Visi : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia											
Misi 3 : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Willayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.											
3.1	Meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan serta mendorong pengembangan kawasan perbatasan yang tangguh dan berwawasan lingkungan										
	3.1.4	Terjaganya kualitas lingkungan dan meningkatnya ketangguhan daerah dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Indeks Resiko Bencana	137,73	126,68	122,38	188,07	113,77	109,46	105,15	

2.6. Telaah Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Riau.

Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik ditingkat Pusat, Provinsi, maupun

Kabupaten/ kota untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan Daerah dan Nasional. Dalam kerangka sinergi tersebut, penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis perlu menelaah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau serta Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

1. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 searah dan sejalan dengan Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 yakni “BNPB yang handal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong” Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, maka cara-cara yang akan ditempuh atau misi pembangunan Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

1. Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
2. Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan Iptek, memperkuat daya saing perekonomian.
3. Memantapkan pembangunan secara keunggulan kopetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek.
4. mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan visi tersebut di atas, ditemukan keterkaitannya dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis yaitu bagaimana meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dibidang penanggulangan Bencana. Dengan demikian pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis juga berimplikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

2.7. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Jika ditinjau melalui rencana tata ruang wilayah, kebijakan dan strategis penataan Ruang Wilayah Kabupaten diantaranya adalah melaksanakan kebijakan menyelenggarakan keterpaduan mitigasi kebencanaan dan penanganan kebencanaan yang responsif dan dinamis.

Dari isu strategis menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan tersebut sasaran yang diharapkan salah satunya adalah Terwujudnya Penanggulangan Bencana yang Tangguh yaitu dengan cara peningkatan kualitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan pengembangan sistem manajemen penanganan bencana terpadu serta peningkatan kualitas pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pencapaian pengendalian kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dengan strategi meliputi:

- a. Menetapkan kawasan rawan bencana alam sesuai sifat dan jenis bencana alam berupa bencana kebakaran hutan dan lahan, Abrasi, Puting Beliung dan Banjir;
- b. Mengidentifikasi tingkat resiko wilayah pada kawasan rawan bencana alam;
- c. Mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana sesuai sifat dan jenis bencana, serta karakteristik wilayah;
- d. Mengembangkan sistem mitigasi bencana; dan
- e. Mengembangkan manajemen perencanaan, pencegahan, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pada kawasan rawan bencana alam.

Untuk mewujudkan perencanaan dan pengendalian kawasan rawan bencana alam perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan pemetaan kawasan rawan berupa bencana;
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan sosialisai terhadap wilayah masyarakat yang memiliki potensi bahaya bencana;
- c. Pembangunan ruang evakuasi bencana;
- d. Pembangunan jalur-jalur evakuasi;
- e. Penetapan daerah rawan bencana sebagai kawasan konservasi.

Hal tersebut perlu segera dilakukan mengingat adanya beberapa hal yang selama ini menjadi faktor penghambat pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya koordinasi BPBD dengan PD dalam penanggulangan bencana disebabkan minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan arti penting ancaman bencana. Sementara ini masih ada paradigma meremehkan bencana yang berimbas pada minimnya anggaran untuk kebencanaan. Padahal resiko yang ditimbulkan bencana selama ini berdampak serius pada tatanan kehidupan bermasyarakat. Semua hasil pembangunan selama bertahun-tahun dapat musnah hanya dalam waktu singkat.
- b. Keterlambatan pelayanan yang diakibatkan luasnya wilayah penanganan bencana sehingga diperlukan ekstra waktu tempuh karena jarak antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan lokasi kebencanaan yang ada.

2.8. Penentuan Isu-isu Strategis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah, kebijakan Nasional, Berbagai permasalahan pembangunan bidang penanggulangan bencana yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan bidang penanggulangan bencana. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis ditinjau dari gambaran pelayanan, visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra BNPB, sasaran jangka menengah dari Renstra BPBD Prov. Riau, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14. Identifikasi Isu Strategis KLHS

No	Tingkat Isu	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan
----	-------------	---------------	-----------------------------

1.	Belum Optimalnya Pengelolaan Konservasi Pada Ekosistem Daratan dan Pengendalian Abrasi, Resiko Banjir, Abrasi Serta Perbaikan Ekosistem Mangrove	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Wilayah Pesisir Secara Berkelanjutan	Melaksanakan Pengendalian Bencana
----	--	--	-----------------------------------

Terdapat berbagai macam upaya yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan RPB ke dalam RPJMD salah satunya dengan melakukan peningkatan kapasitas Daerah di daerah. Sesuai dengan kaidah penyelenggaraan penanggulangan bencana, kapasitas penanggulangan bencana juga ditinjau pada fase terdapat potensi terjadinya bencana dan fase tanggap darurat. Pelaksanaan penanggulangan bencana pada fase tersebut mengharuskan adanya kapasitas perencana untuk menetapkan kebijakan dan strategi yang efektif untuk menanggulangi bencana. Sistem peringatan dini dan analisis risiko merupakan tuntutan kapasitas untuk mengembangkan skenario, kebijakan dan strategi kontijensi Selanjutnya isu-isu strategis terkait Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 :

1. Penguatan Pengurangan Resiko Bencana

Penanggulangan Bencana dititikberatkan pada pengurangan resiko bencana, hal ini menjadi paradigma baru penanggulangan bencana, pemahaman terhadap pengurangan resiko bencana sangat minim. Dalam menyikapi isu ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau mesti menjadi pelopor untuk pengurangan resiko bencana di Provinsi Riau agar masyarakat Riau terlindungi dari ancaman bencana.

2. Pembenahan Sistem Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau selama ini cenderung bersifat Responsif, seharusnya dilakukan secara preventif, untuk mewujudkan itu perlu dibuat Sistem Penanggulangan Bencana yang handal dengan menerapkan Manajemen Bencana baik pada saat Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana.

3. Pemulihan Pasca Bencana

Penanganan Bencana selama ini selalu fokus pada saat kejadian bencana, ketika bencana telah berakhir semua dianggap sudah berakhir, sebagaimana yang kita saksikan terhadap jalan, turab, bangunan roboh akibat bencana terbiarkan begitu saja hingga bertahun-tahun. Semestinya

sesuai dengan paradigma baru penanggulangan bencana pemulihan pasca bencana perlu dilakukan.

4. Penguatan Kelembagaan

Sebagai Lembaga yang dituntut eksistensinya agar mampu menjalankan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau masih sangat terbatas dalam hal sarana, prasarana, serta kapasitas aparatur tanggap darurat bencana.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Penanggulangan Bencana adalah tanggung jawab bersama yaitu, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, namun saat ini pemahaman penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama masih sangat minim sehingga perlu disosialisasikan agar masyarakat dan dunia usaha bisa berperan serta didalam penanggulangan bencana.

BAB III

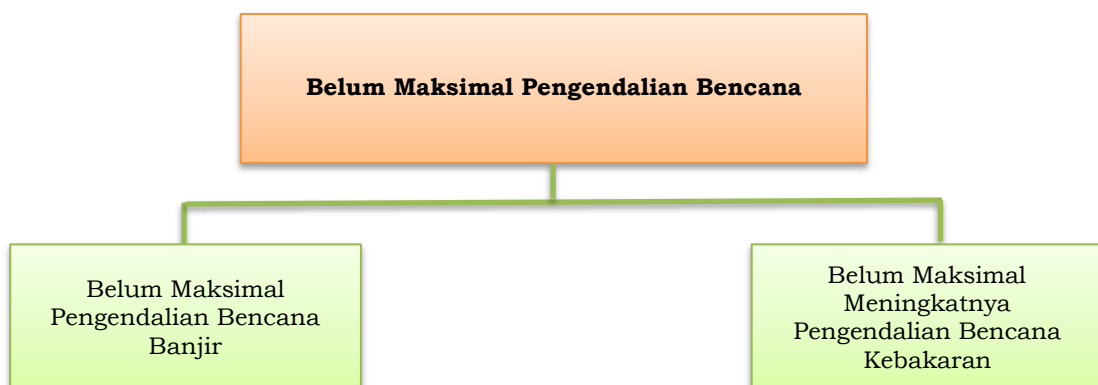
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

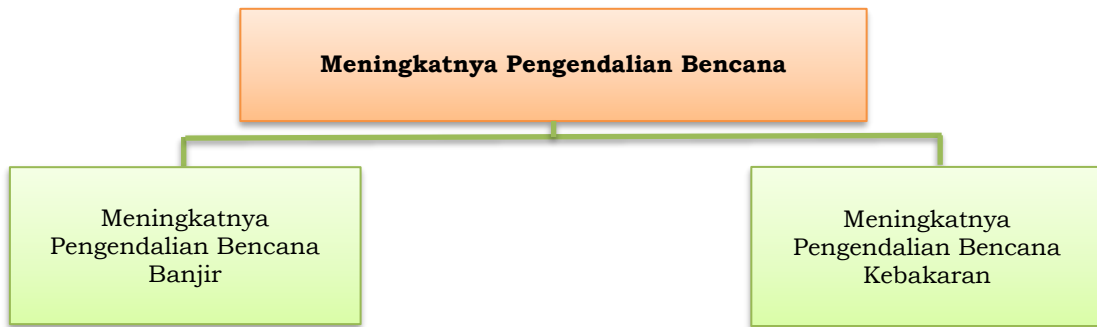
Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 2 (dua) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan dapat di analisa melalui pohon masalah, pohon tujuan dan analisa keberhasilan indikator tujuan, yakni:

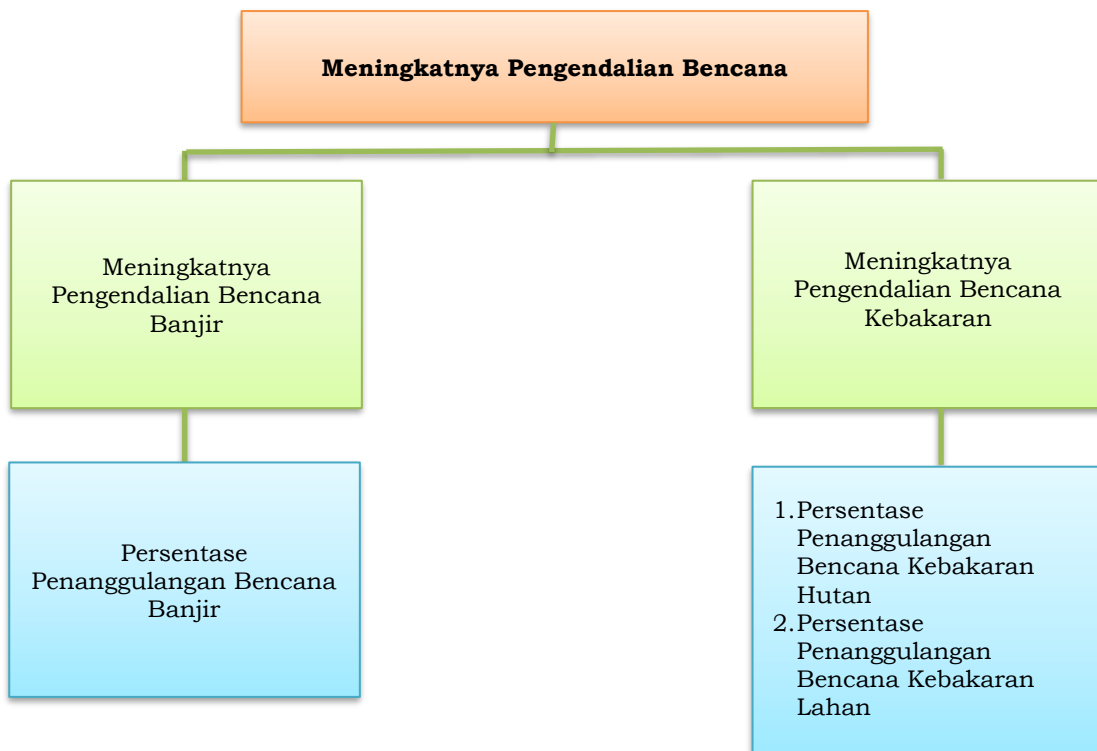
Gambar 3.1 Analisa Pohon Masalah (-)



Gambar 3.2 Analisa Pohon Tujuan (+)



Gambar 3.3 Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)



Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Pengendalian Bencana	Indeks Resiko Bencana	Meningkatnya Pengendalian Bencana Banjir	Persentase penanggulangan Bencana Banjir	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Penendalian Bencana Kebakaran	Persentase Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB

Tabel 3.2
FORMULASI MASING-MASING INDIKATOR KINERJA UTAMA TERHADAP SASARAN

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL/PENJELASAN	FORMULASI PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya Pengendalian Bencana Banjir	Persentase penanggulangan Bencana Banjir	Warga Negara yang mendapatkan atau Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana, Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Penanganan Bencana Banjir ----- x 100% Jumlah Kejadian Bencana Banjir
	Meningkatnya Penendalian Bencana Kebakaran	Persentase Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan		Jumlah Penanganan Bencana Kebakaran Hutan ----- x 100% Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan
		Persentase Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan		Jumlah Penanganan Bencana Kebakaran Lahan ----- x 100% Jumlah Kejadian Kebakaran Lahan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat (LHE SAKIP BPBD)	Dokumen SAKIP BPBD

3.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, setrategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Adapun strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN RPJMD KABUPATEN BENGKALIS 2025-2029

VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA				
Misi 3 : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.				
3.2. Terwujudnya penataan dan pembangunan kawasan berwawasan lingkungan.	3.2.2. Terwujudnya pembangunan kawasan berwawasan lingkungan hidup.	3.2.2.2. Indeks Resiko Bencana	3.2.2.1.1. Penguatan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan	3.2.2.1.1.3. Melaksanakan Pengendalian Bencana

Tabel 3.4
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN BPBD KABUPATEN BENGKALIS 2025-2029

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA					
Misi III : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Masyarakat.					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Pengendalian Bencana	1. Indeks Resiko Bencana	1. Meningkatnya Pengendalian Bencana Banjir	1.1. Persentase Penanggulangan Bencana Banjir	1.2.1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Kebencanaan	1.2.1.1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Kebencanaan
		2. Meningkatnya Pengendalian Bencana Kebakaran	1.2. Persentase Penanggulangan Bencana Kebakaran	1.2.2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Resiko Bencana	1.2.2.1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Resiko Bencana
				1.2.3. Peningkatan Sarana dan Prasarana	1.2.3.1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
				1.2.4. Peningkatan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana	1.2.4.1. Meningkatnya Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana
				3.1.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Logistik Bencana	3.1.2.1. Tersedianya Logistik Bencana Sesuai Kebutuhan

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA					
Misi III : Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Masyarakat.					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				1.1.1. Peningkatan Koordinasi yang Baik dalam Penanggulangan Bencana	1.1.1.1. Meningkatkan Koordinasi antar Instansi Yang Baik dalam Penanggulangan Bencana

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dihasilkan dari analisa SWOT :

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang (O) : 1. Tersedianya Jumlah Personil dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 2. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan Mengenai Penanggulangan Bencana Baik Status Siaga Darurat Maupun Tanggap Darurat Bencana; 3. Penanggulangan Bencana Di Tangani Secara Tim Dengan Melibatkan Stakeholder Terkait	Tantangan (T): 1. Luasnya Jangkauan wilayah Penanggulangan Bencana; 2. Koordinasi antar Instansi Terkait Belum Maksimal; 3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam Resiko Bencana;
	Kekuatan (S) 1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas; 2. Terdapatnya jumlah aparaturnya yang memadai; 3. Penempatan Personil Sudah Ada Di Setiap Kecamatan;	Alternatif Strategi (S-O): 1. Peningkatan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana
Kelemahan (W): 1. Kualitas SDM masih belum memadai; 2. Belum terdapatnya informasi kebencanaan dalam daerah; 3. Kurangnya sarana dan prasarana Serta Logistik bencana;	Alternatif Strategi (W-O): 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Logistik Bencana; 2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Kebencanaan;	Alternatif Strategi (W-T): 1. Peningkatan Koordinasi Yang Baik dalam Penanggulangan Bencana;

Gambar 3.4 Matrik Analisis SWOT

Matrik SWOT merupakan cara sistematis untuk mengidentifikasi keempat faktor yang tercakup dalam analisis yang menggambarkan kecocokan paling baik diantaranya. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi akan memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Matrik SWOT digunakan untuk mengembangkan empat tipe alternatif strategi yaitu SO (strengths- opportunities), strategi WO (weaknessesopportunities), strategi ST (strengths-threats), dan strategi WT (weaknesses- threats). Terdapat empat tahapan dalam membentuk matrik SWOT yaitu:

- Mencocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan mencatat resultan strategi SO.
- Mencocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan mencatat resultan strategi WO
- Mencocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat resultan strategi ST.
- Mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman dan mencatat resultan strategi WT.

Analisis ini dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategis seperti tergambar pada Matrik SWOT Gambar 5.1 di atas.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mewujudkan visi dan Misi Kepala Daerah melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis menetapkan Program, Kegiatan Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pada Program Pembangunan Daerah dalam RPJMD 2025-2029 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :

Program Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penanggulangan Bencana

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode Renstra tahun 2021-2026, berikut uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan di laksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis :

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - e. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah Dengan. sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan Mebel
 - d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penanggulangan Bencana

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana. sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
 - b. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
 - c. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
 - d. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
 - e. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

- f. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - g. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
 - h. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
 - i. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - j. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - k. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
 - b. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - c. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - d. Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
 - e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota
 - f. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - g. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
 - h. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana. sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - c. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
 - d. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - e. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - f. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
 - g. Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

- h. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- i. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
- j. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
- k. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
- l. Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

4.2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang ditetapkan didalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yakni sarana, prasarana dan layanan penanggulangan bencana yang menjadi urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis serta aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dan masyarakat. Penetapan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2025)		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
											TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030						
									TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					
1	2	3	4				5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22	
Meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan serta mendorong pengembangan kawasan perbatasan yang tangguh dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	01	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah		9.768.193.331,000		10.260.332.889,911		11.489.030.588,638		11.608.490.900,275		11.640.543.743,381		11.493.412.666,808		56.491.810.789	BPBD	Kabupaten Bengkalis
			01	05	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		120.000.000		145.000.000		420.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		1.915.000,000	BPBD	Kabupaten Bengkalis
			01	05	01	20101	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30.000.000	1	35.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	435.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kabupaten Bengkalis
			01	05	01	20101	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	1	35.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	435.000.000		
			01	05	01	20101	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	1	30.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	430.000.000		
			01	05	01	20101	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	30.000.000	4	30.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	20	430.000.000		
			01	05	01	20101	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	185.000.000		

TUJUAN	SASA RAN	INDIKATO R SASARA N	KODE					PROGRAM/KEGIAT AN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATA N/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2025)		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA OPD PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
												TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030					
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22
			010202	0501	0102	2000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Bagi ASN BPBD		6.013.521.971		6.620.661.529,91		6.847.053.350,64		6.906.513.662,28		6.901.793.345,38		6.854.662.268,81		34.130.684.157	BPBD	Kabupat en Bengkali s	
			010202	0501	0102	2000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ 12 Bulan	5.983.521.971	12	6.510.661.529,911	12	6.547.053.350,638	12	6.606.513.662,275	12	6.601.793.345,381	12	6.554.662.268,808	60	32.820.684.157	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah	Kabupat en Bengkali s	
			010202	0501	0102	2000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	10.000.000	1	30.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	430.000.000			
			010202	0501	0102	2000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000	1	30.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	430.000.000			
			010202	0501	0102	2000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	10.000.000	4	50.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	20	450.000.000			
			010203	0501	0103	2000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang yang diKuasai SKPD		210.000.000		210.000.000		210.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		1.170.000.000	BPBD	Kabupat en Bengkali s	
			010203	0501	0103	2000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	210.000.000	1	210.000.000	1	210.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5	1.170.000.000	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah	Kabupat en Bengkali s	
			010205	0501	0105	2000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Bagi ASN pada BPBD		350.000.000		100.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		1.500.000.000	BPBD	Kabupat en Bengkali s	
			010205	0501	0105	2000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	250.000.000	0	-	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	8	1.000.000.000			
			010205	0501	0105	2001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikut Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	8 Orang	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	40	500.000.000			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2025)		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA OPD PENANGGULANG JAWAB	LOKASI	
								TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030						
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1	2	3	4		5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22
			010206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Bagi ASN BPBD		964.500.000		1.064.500.000		1.341.805.878		1.341.805.878		1.341.805.878		1.341.805.878		6.431.723.512	BPBD	Kabupat en Bengkalis
			010206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	57.000.000	16	57.000.000	16	91.805.878	16	91.805.878	16	91.805.878	16	91.805.878	80	424.223.512	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah	Kabupat en Bengkalis
			010206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	82 Paket	77.000.000	82	77.000.000	82	100.000.000	82	100.000.000	82	100.000.000	82	100.000.000	410	477.000.000		
			010206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	650 Paket	85.000.000	1	85.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	485.000.000		
			010206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	44.000.000	9	44.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000	45	444.000.000		
			010206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	500.000.000	1	600.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	5	3.400.000.000		
			010206	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	201.500.000	1	201.500.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5	1.201.500.000		
			010207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan aset Sebagai Penunjang Urusan BPBD		850.000.000		860.000.000		1.060.000.000		1.050.000.000		1.050.000.000		950.000.000		4.970.000.000	BPBD	Kabupat en Bengkalis
			010207	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	1	50.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	9	1.050.000.000	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah	Kabupat en Bengkalis

TUJUAN	SASA RAN	INDIKATO R SASARA N	KODE				PROGRAM/KEGIAT AN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATA N/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2025)		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA OPD PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
											TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030					
											TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4				5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22
			010207	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	0	-	8	400.000.000		
			010207	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	10	110.000.000	10	110.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	50	520.000.000				
			010207	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	10	2.000.000.000						
			010207	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000						
			010208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan BPBD		528.560.160	528.560.160	528.560.160	528.560.160	528.560.160	528.560.160	2.642.800.800	BPBD	Kabupaten Bengkulu								
			010208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	1	13.000.000	5	65.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kabupaten Bengkulu				
			010208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	5	800.000.000								
			010208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	355.560.160	1	355.560.160	1	355.560.160	1	355.560.160	5	1.777.800.800								
			010209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Aset Penunjang Urusan BPBD		731.611.200	731.611.200	731.611.200	731.611.200	768.384.360	768.384.360	3.731.602.320	BPBD	Kabupaten Bengkulu								
			010209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	239.602.000	6	239.602.000	6	239.602.000	6	239.602.000	30	1.198.010.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kabupaten Bengkulu						

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2025)		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA OPD PENANGGULUNG JAWAB	LOKASI
												TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030					
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22
			01	05	01	2009	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	277.606.000	11	277.606.000	11	277.606.000	11	277.606.000	11	277.606.000	11	277.606.000	55	1.388.030.000		
			01	05	01	2009	0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	101.176.360	20	101.176.360	25	101.176.360	25	101.176.360	30	101.176.360	30	101.176.360	130	505.881.800		
			01	05	01	2009	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	113.226.840	1	113.226.840	1	113.226.840	1	113.226.840	1	150.000.000	1	150.000.000	5	639.680.520		
Terwujudnya Keterpaduan Mitigasi dan Penanganan Kebencanaan Yang Responsif dan Dinamis	Terjaganya kualitas lingkungan dan meningkatnya ketangguhan daerah dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Indeks Resiko Bencana	1053	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					9.193.709.665		8.159.542.754		8.311.638.934		8.417.445.213		8.797.635.301		42.879.971.866	BPBD	Kabupaten Bengkalis
		Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai ancaman bencana	1053	03	2001			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			710.000.000		150.000.000		100.000.000		400.000.000		100.000.000		700.000.000		1.450.000.000	BPBD	Kabupaten Bengkalis
			1053	03	2001	0007		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya dikawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (perjenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	1000 Orang	110.000.000	1000	150.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	1000	100.000.000	5000	550.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kabupaten Bengkalis		
			1053	03	2001	0008		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	1 Dokumen	600.000.000	0		0		1	300.000.000	0	-	1	600.000.000	2	900.000.000		
		Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1053	03	2002			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1.465.000.000		1.155.660.058		645.000.000		645.000.000		845.000.000		624.092.547	100%	3.914.752.604	BPBD	Kabupaten Bengkalis
			1053	03	2002	0013		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (perjenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	5	375.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kabupaten Bengkalis

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2025)		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030					
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22
			1	05	03	202	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara,Keluarga,maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana dikawasan tempat tinggalnya	2 Unit	100.000.000	1	40.660.058	0	-	1	100.000.000	2	100.000.000	0	-	4	240.660.058		
			1	05	03	202	0018	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (perjenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	59.092.547	500	179.092.547		
			1	05	03	202	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga	100.000.000	100	100.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	500	420.000.000		
			1	05	03	202	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (perjenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	11 Kawasan	80.000.000	11	80.000.000	11	80.000.000	11	80.000.000	11	80.000.000	11	80.000.000	55	400.000.000		
			1	05	03	202	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personel Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRCPB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	100 Orang	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	0	-	20	100.000.000	80	400.000.000		
			1	05	03	202	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (perjenis ancaman bencana)sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1(satu) tahun	2 Dokumen	100.000.000	0	-	2	50.000.000	0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	6	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kabupaten Bengkalis

TUJUAN	SASA RAN	INDIKATO R SASARA N	KODE					PROGRAM/KEGIAT AN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)KEGIATA N/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2025)		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA OPD PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
												TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030					
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22
			1	0 5	0 3	2 - 0 2	002 3	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1(satu) tahun	1 Dokumen	150.000.000	0	-	1	50.000.000	0	-	1	50.000.000	0	-	2	100.000.000		
			1	0 5	0 3	2 - 0 2	002 6	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops)dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggalnya	1 Laporan	30.000.000	1	30.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	430.000.000				
			1	0 5	0 3	2 - 0 2	002 7	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)Kabupaten/Kotas ampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1(satu) tahun	1 Dokumen	600.000.000	1	600.000.000	0	-	0	-	1	200.000.000	0	-	2	800.000.000		
			1	0 5	0 3	2 - 0 2	002 8	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	11 Kawasan	100.000.000	11	100.000.000	6	80.000.000	6	80.000.000	6	80.000.000	6	80.000.000	35	420.000.000		
			Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Termasuk Kebakaran Hutan dan Lahan	1	0 5	0 3	2 - 0 3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		7.489.049.607		7.239.049.607		6.664.542.754		6.764.542.754		6.862.445.213		6.864.542.754			
		1	0 5	0 3	2 - 0 3	000 1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa nyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	100.000.000	0	-	1	50.000.000	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kabupaten Bengkalis	
		1	0 5	0 3	2 - 0 3	000 2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4 Dokumen	150.000.000	4	150.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	97.902.459	4	100.000.000	20	547.902.459			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2025)		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
												TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030					
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22
			1	05	03	2103	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan,Ditolong dan Dievakuasi PerJenis Kejadian Bencana	200 Orang	6.439.049.607	200	6.439.049.607	200	6.164.542.754	200	6.164.542.754	200	6.164.542.754	200	6.164.542.754	1000	31.097.20.623		
			1	05	03	2103	0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 Dokumen	150.000.000	1	150.000.000	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	300.000.000		
			1	05	03	2103	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	5 Orang	150.000.000	5	150.000.000	5	100.000.000	0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	14	350.000.000		
			1	05	03	2103	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang	150.000.000	50	150.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	250	550.000.000		
			1	05	03	2103	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	150.000.000	0	-	1	50.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	500.000.000		
			1	05	03	2103	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2 Laporan	200.000.000	2	200.000.000	2	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	900.000.000		
	Meningkatnya Keterpaduan Pemenuhan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sesuai Kebutuhan Korban Bencana	1	05	03	2104		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		1.300.000.000		649.000.000		750.000.000		502.096.180		610.000.000		609.000.000		3.120.096.180	BPBD	Kabupaten Bengkalis	
			1	05	03	2104	0001	Penyusunan regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	100.000.000	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	300.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kabupaten Bengkalis
			1	05	03	2104	0003	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	100.000.000	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	0	-	1	50.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2025)		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA OPD PENANGGULUNG JAWAB	LOKASI
												TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030					
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4					5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22
			1	05	03	204	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	100.000.000	1	100.000.000	1	50.000.000	1	52.096.180	1	60.000.000	1	60.000.000	5	322.096.180		
			1	05	03	204	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	100.000.000	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	300.000.000		
			1	05	03	204	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang mendapat pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	5 Orang	100.000.000	5	100.000.000	0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	11	250.000.000		
			1	05	03	204	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana(JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P)	5 Orang	100.000.000	0	-	2	50.000.000	0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	6	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kabupaten Bengkalis
			1	05	03	204	0010	Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana disemua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P)Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	150.000.000	1	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	550.000.000		
			1	05	03	204	0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	3 Lembaga	100.000.000	0	-	3	100.000.000	3	100.000.000	0	-	3	50.000.000	9	250.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2025)		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
												TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030						
										TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1	2	3	4					5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22	
			1	05	03	204	0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terdistribusi di daerah rawan bencana	1 Laporan	100.000.000	0	-	1	100.000.000	0	-	0	-	1	100.000.000	2	200.000.000			
			1	05	03	204	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	100.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	0	-	4	390.000.000			
			1	05	03	204	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	150.000.000	0	-	1	150.000.000	0	-	1	100.000.000	0	-	2	250.000.000			
			1	05	03	204	0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	100.000.000	1	9.000.000	0	-	0	-	0	-	1	99.000.000	2	108.000.000			
BELANJA PECAHAWAI														6.620.661.530		6.847.053.351		6.906.513.662		6.901.793.345		6.854.662.269		34.130.684.157		
JUMLAH PAGU PENDANAAN INDIKATIF														19.454.042.555		19.648.573.343		19.920.129.834		20.057.988.956		20.291.047.968		99.371.782.655		

4.3. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing Daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcomes/hasil*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output/keluaran*).

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijadikan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah

Indikator ini akan menggambarkan pengelolaan transportasi yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sehingga pada saat yang sama tergambar bahwa terjadi peningkatan kualitas kinerja pelayanan bencana yang semakin baik. Selengkapny target-target capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis untuk periode 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 4.2. berikut ini:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2024)	TARGET KINERJA TAHUN KE					Kondisi pada akhir Periode RPJMD (2030)
			2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Penanggulangan Bencana Banjir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Predikat Kinerja Daerah Capaian Perangkat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025- 2029 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran BPBD sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk

menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra BPBD adalah sebagai berikut:

1. Renstra badan penanggulangan bencana daerah akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala badan pelaksana penanggulangan bencana daerah, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, BPBD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra badan penanggulangan bencana daerah dilakukan sekurang- kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra badan penanggulangan bencana daerah dilakukan melalui Renja badan penanggulangan bencana daerah setiap tahun dan realisasinya melalui DPA badan penanggulangan bencana daerah setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja badan penanggulangan bencana daerah tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra badan penanggulangan bencana daerah dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja badan penanggulangan bencana daerah diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama

RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.

Bengkalis,

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BENGKALIS



Drs. SUFANDI, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19960723 199710 1 001

LAMPIRAN 1.

Matrik Analisa SWOT

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang (O) :	Tantangan (T):
	1. Tersedianya Jumlah Personil dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 2. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan Mengenai Penanggulangan Bencana Baik Status Siaga Darurat Maupun Tanggap Darurat Bencana; 3. Penanggulangan Bencana Di Tangani Secara Tim Dengan Melibatkan Stakeholder Terkait	1. Luasnya Jangkauan wilayah Penanggulangan Bencana; 2. Koordinasi antar Instansi Terkait Belum Maksimal; 3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam Resiko Bencana;
Kekuatan (S) 1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas; 2. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai; 3. Penempatan Personil Sudah Ada Di Setiap Kecamatan;	Alternatif Strategi (S-O): 1. Peningkatan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana	Alternatif Strategi (S-T): 1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Resiko Bencana;
Kelemahan (W): 1. Kualitas SDM masih belum memadai; 2. Belum terdapatnya informasi kebencanaan dalam daerah; 3. Kurangnya sarana dan prasarana Serta Logistik bencana;	Alternatif Strategi (W-O): 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Logistik Bencana; 2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Kebencanaan;	Alternatif Strategi (W-T): 1. Peningkatan Koordinasi Yang Baik dalam Penanggulangan Bencana;